

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  
MENGEMBANGKAN PARIWISATA MADA OI TAMPURO  
KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA**

***ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT POLICY IN DEVELOPING MADA  
OI TOURISM IN TAMPURO, SANGGAR DISTRICT, BIMA REGENCY***

**Wira Purdiawan Putra, Taufik Firmanto dan Gufran**

**Universitas Muhammadiyah Bima**

Korespondensi Penulis : [alsanggarwira@gmail.com](mailto:alsanggarwira@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Putra, Wira Purdiawan, Taufik Firmanto dan Gufran. *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Pariwisata Mada Oi Tampuro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima.*

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

**ABSTRAK**

Pariwisata Mada Oi Tampuro memiliki potensi besar sebagai destinasi unggulan di Kabupaten Bima. Namun, pengembangannya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kebijakan. Artikel ini menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Bima dalam mendukung pengembangan pariwisata di kawasan tersebut. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan belum terintegrasi secara optimal antara perencanaan, regulasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kesimpulannya, diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan serta penguatan kelembagaan dan infrastruktur pariwisata secara berkelanjutan.

**Kata Kunci: Kebijakan Daerah, Pariwisata, Pemberdayaan, Potensi Lokal, Regulasi**

**ABSTRACT**

*Mada Oi Tampuro tourism has significant potential as a leading destination in Bima Regency. However, its development still faces several structural and policy obstacles. This article analyzes the local government's policies in supporting tourism development in the area. The results indicate that the policies are not yet optimally integrated between planning, regulation, and community empowerment. It concludes that synergy between stakeholders, institutional strengthening, and sustainable infrastructure development are crucial.*

**Keywords: Community Empowerment, Local Policy, Local Potential, Regulation, Tourism**

## **A. PENDAHULUAN**

Pariwisata merupakan sektor yang memiliki kontribusi strategis terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah.<sup>1</sup> Dalam pembangunan nasional, sektor pariwisata tidak hanya dipandang sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya dan lingkungan hidup.<sup>2</sup> Pengembangan sektor ini telah menjadi bagian dari agenda prioritas pembangunan, sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan berbagai regulasi turunannya.<sup>3</sup>

Kabupaten Bima, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki kekayaan alam dan budaya, menyimpan potensi wisata yang sangat besar, salah satunya adalah obyek wisata Mada Oi Tampuro yang terletak di Kecamatan Sanggar. Mada Oi Tampuro menawarkan pesona alam yang eksotis berupa sumber mata air panas yang dipercaya memiliki khasiat kesehatan, serta dikelilingi lanskap pegunungan yang asri.<sup>4</sup> Di samping potensi ekologis, kawasan ini juga memiliki nilai-nilai budaya dan sejarah lokal yang dapat menjadi daya tarik wisata berbasis kearifan lokal.<sup>5</sup>

Namun demikian, potensi besar ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Berbagai kendala struktural dan kebijakan masih menjadi penghambat utama dalam proses pengembangan pariwisata di kawasan ini. Secara umum, persoalan yang dihadapi antara lain: belum tersedianya infrastruktur pendukung yang memadai, rendahnya promosi dan branding destinasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kurangnya keterlibatan masyarakat lokal secara aktif dalam pengelolaan pariwisata.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Fitri Nur Awalliyah, Aan Anwar Sihabudin dan Dini Yuliani, *Implementasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Ciamis*, Inskripsi, Vol.2, No.1 (Maret 2022).

<sup>2</sup> Mahardika Berliandaldo dan Ari Prasetio, *Analisa dan Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Kendaraan Bermotor Listrik pada Sektor Pariwisata Indonesia*, Sanskara Hukum Dan HAM, Vol.1, No.02 (2022).

<sup>3</sup> Fena Pebriana, Rahman Mulyawan dan Budi Sutrisno, *Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra), Vol.1, No.1 (2021).

<sup>4</sup> Zam ZamMasrurun dan Dyah Meutia Nastiti, *Analisis Stakeholders dalam Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Wonosobo*, Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia, Vol.17, No.1 (2023).

<sup>5</sup> Syukri, Herman Fithra dan M Akmal, *Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak*, Jurnal Transparansi Publik (JTP), Vol.2, No.1 (2022).

<sup>6</sup> Novia Fera Roza, Afifuddin dan Suyeno Suyeno, *Analisis Kebijakan Peran Pariwisata terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kota Batu*, Respon Publik, Vol.16, No.1 (2022).

Dalam tinjauan kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan adanya gap antara potensi riil dengan dukungan kebijakan yang tersedia, baik dari aspek regulasi maupun implementasi.<sup>7</sup> Secara filosofis, pengembangan pariwisata seharusnya mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yakni pembangunan yang tidak hanya mengejar aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial-budaya.<sup>8</sup> Prinsip ini menjadi sangat relevan mengingat karakteristik wisata Mada Oi Tampuro yang berbasis alam dan budaya lokal. Dengan kata lain, pendekatan pariwisata yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan justru akan merusak nilai intrinsik destinasi itu sendiri.<sup>9</sup>

Secara yuridis, kerangka hukum yang mengatur sektor pariwisata di Indonesia telah memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan potensi pariwisata secara otonom.<sup>10</sup> Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menegaskan bahwa pengembangan pariwisata merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.<sup>11</sup> Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola urusan pariwisata sebagai bagian dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.<sup>12</sup> Namun dalam praktiknya, implementasi kewenangan tersebut kerap tak berjalan optimal akibat keterbatasan anggaran, SDM, serta minimnya political will dari pemerintah daerah.

---

<sup>7</sup> Andri Kurniawan, *Pelaksanaan Strategi Pengembangan Program Wisata Bono oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan*, *JLABIS: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Dan Sosial*, Vol.1, No.2 (2023).

<sup>8</sup> Ferbiansyah Yona Alfianto, *Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Pakuncen*, *Paradigma*, Vol.10, No.1 (2021).

<sup>9</sup> Dudi Ahmad Wardiana, Ria Arifianti dan Mohammad Benny Alexandri, *Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kawasan Wisata Situ Cileunca Kabupaten Bandung*, *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, Vol.4, No.4 (2021).

<sup>10</sup> Zulfa Harirah, Wazni Azwar dan Isril Isril, *Melacak Eksistensi Kearifan Lokal dalam Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Siak di Era Globalisasi*, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol.10, No.1 (2021).

<sup>11</sup> Ine Mariane, Aswin Palls dan Andre Ariesmansyah, *Model Policy Network dalam Menunjang Implementasi Kebijakan Pariwisata di Kabupaten Kuningan*, *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol.13, No.2 (2022).

<sup>12</sup> Dina Mayasari Soeswoyo, *Potensi Pariwisata dan Strategi Pengembangan Desa Wisata Sukajadi di Kabupaten Bogor*, *Masyarakat Pariwisata: Journal of Community Services in Tourism*, Vol.2, No.1 (2021).

Dari sudut pandang sosiologis, pembangunan pariwisata yang tidak melibatkan masyarakat setempat secara aktif akan menimbulkan resistensi sosial dan ketimpangan manfaat.<sup>13</sup> Sebaliknya, pariwisata berbasis masyarakat (community-based tourism) justru terbukti mampu menciptakan rasa kepemilikan, memperkuat identitas lokal, serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi turunan.<sup>14</sup> Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang berpihak kepada masyarakat lokal sebagai pelaku utama, bukan sekadar sebagai objek pembangunan. Sehingga, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata Mada Oi Tampuro, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi strategis yang dapat diambil untuk mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji efektivitas kebijakan daerah dari aspek substansi kebijakan, pelaksanaan di lapangan, serta dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam mengembangkan pariwisata Mada Oi Tampuro Kecamatan Sanggar?
2. Apa saja tantangan dan solusi strategis dalam pelaksanaan kebijakan tersebut untuk mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan?

## **B. PEMBAHASAN**

Mada Oi Tampuro, yang terletak di Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, adalah sebuah kawasan yang kaya akan potensi alam dan budaya. Desa ini memiliki pemandangan alam yang menakjubkan, termasuk pegunungan, pantai, dan hutan tropis yang masih terjaga kelestariannya. Keindahan alam ini memiliki daya tarik yang kuat bagi wisatawan, baik domestik maupun internasional. Namun, meskipun memiliki potensi besar, kawasan ini belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam konteks pariwisata. Salah satu alasan utama adalah infrastruktur yang terbatas dan kurangnya promosi yang efektif.

---

<sup>13</sup> Simon Sumanjoyo Hutagalung dan Dedy Hermawan, *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata di Lampung Selatan*, Sosiohumaniora, Vol.23, No.1 (2021).

<sup>14</sup> Jasilatul Khotimah dan Aprilina Pawestri, *Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai*, Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, Vol.15, No.2 (2022).

Sebagai respons terhadap potensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima telah mengidentifikasi Mada Oi Tampuro sebagai salah satu daerah yang dapat dikembangkan untuk sektor pariwisata. Dalam RPJMD Kabupaten Bima, pengembangan pariwisata menjadi salah satu fokus utama untuk mendiversifikasi ekonomi daerah, yang selama ini bergantung pada sektor pertanian. Kebijakan yang telah dilaksanakan mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, fasilitas umum, dan peningkatan aksesibilitas menuju destinasi wisata. Pemerintah daerah juga mulai mengembangkan regulasi yang mendukung keberlanjutan alam dan budaya setempat. Namun, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya optimal. Di lapangan, meskipun ada upaya peningkatan infrastruktur, seperti perbaikan jalan utama yang mengarah ke Mada Oi Tampuro, kualitas aksesibilitas masih menjadi masalah utama, terutama pada musim hujan. Selain itu, meskipun ada kebijakan untuk memberdayakan masyarakat lokal, pelatihan dan kapasitas manajerial mereka dalam mengelola destinasi wisata masih sangat terbatas.

NO	Jenis Wisatawan & Ujung Wisata	Bulan												Jumlah			
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Ok	Nov	Des				
1	Wisatawan Domestik																
2	Pantai Kubu	254	243	235	278	254	234	291	275	245	288	265	212	212	3.889		
3	Widada Lari	349	423	488	328	381	438	388	278	403	454	461	407	407	5.298		
4	Ujung Lingsar	331	248	232	245	347	342	453	354	436	336	334	322	4.883			
5	Museum dan Monas	253	233	234	225	147	138	445	423	332	412	401	334	4.317			
6	Wisata Alam G. Mada	86	134	133	482	436	442	233	241	274	251	262	289	2.286			
7	Wisata Alam Mada Air Tampuro	88	223	229	292	223	223	281	223	243	289	258	349	3.434			
DAFTAR KUNJUNGAN WISATAWAN TAHUN 2024																	
NO	Jenis Wisatawan & Ujung Wisata	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Ok	Nov	Des	Jumlah			
1	Wisatawan Domestik																
2	Pantai Kubu	289	314	316	298	276	341	475	387	438	384	434	388	4.210			
3	Widada Lari	378	423	487	347	413	454	412	403	344	434	464	444	5.340			
4	Ujung Lingsar	381	298	242	343	345	347	483	398	412	314	434	443	4.883			
5	Museum dan Monas	253	238	238	243	173	254	234	343	332	412	401	334	4.394			
6	Wisata Alam G. Mada	212	222	224	482	436	442	233	241	274	251	262	289	4.217			
7	Wisata Alam Mada Air Tampuro	214	222	228	292	223	223	281	223	243	289	258	349	3.576			

**Gambar 1. Daftar Kunjungan Wisatawan  
Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bima**

Fakta lapangan menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek, banyak tantangan yang masih dihadapi dalam upaya pengembangan pariwisata di Mada Oi Tampuro. Sebagai contoh, akses jalan yang menghubungkan desa ini dengan pusat Kabupaten Bima masih terbilang terbatas dan rusak parah di beberapa titik. Hal ini menyebabkan wisatawan yang datang mengalami kesulitan dalam mencapai lokasi, terutama jika menggunakan kendaraan pribadi. Keadaan ini menjadi penghalang utama bagi wisatawan yang menginginkan kenyamanan dan kemudahan akses.

**Wira Purdiawan Putra, Taufik Firmanto dan Gufran**  
*Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Pariwisata Mada Oi Tampuro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima*

Selain itu, masalah lain yang ditemukan di lapangan adalah minimnya promosi dan branding destinasi. Meskipun Mada Oi Tampuro memiliki keindahan alam yang luar biasa, destinasi ini masih kurang dikenal oleh publik. Tidak ada kampanye pemasaran yang efektif atau promosi melalui media sosial yang dapat menarik perhatian wisatawan, baik domestik maupun internasional. Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat setempat, mereka menyatakan bahwa banyak orang luar yang bahkan tidak mengetahui keberadaan Mada Oi Tampuro.

Di sisi lain, masyarakat setempat sebenarnya sangat terbuka dan antusias terhadap potensi wisata ini, akan tetapi mereka merasa kurang mendapatkan informasi yang cukup tentang cara mengelola dan mempromosikan potensi wisata mereka. Masyarakat lebih banyak mengandalkan kegiatan pertanian dan perikanan sebagai sumber utama pendapatan, sementara sektor pariwisata masih dianggap sebagai sesuatu yang asing dan sulit untuk dikelola tanpa bantuan pemerintah atau pihak luar.

Namun, ada juga beberapa contoh positif yang menunjukkan adanya kemajuan. Beberapa masyarakat setempat mulai terlibat dalam kegiatan penyambutan wisatawan, seperti membuka homestay sederhana dan menyediakan layanan pemandu wisata. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pelatihan dan bimbingan yang lebih intensif, mereka bisa lebih berperan dalam pengembangan sektor pariwisata di desa mereka.

Pengelolaan destinasi wisata Mada Oi Tampuro, penting untuk mengkaji sejauh mana kebijakan pemerintah daerah telah mengintegrasikan pendekatan hukum berbasis kearifan lokal dengan regulasi formal yang ada. Kajian ini juga mempertimbangkan kontribusi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan wisata, serta menelusuri keberadaan instrumen hukum lokal seperti Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung perlindungan kawasan dan pelibatan masyarakat setempat. Hal ini menjadi relevan untuk mendorong perumusan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan adaptif terhadap perubahan global di sektor pariwisata. Dari segi metodologi, penggunaan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bima, Dinas Pariwisata, maupun peraturan perundang-undangan terkait, penting untuk menjaga validitas dan objektivitas analisis.

Penggunaan gambar statistik atau peta yang berasal dari dokumen institusional resmi memberikan legitimasi akademik terhadap paparan data, dibandingkan dengan penggunaan citra atau tangkapan layar yang tidak melalui proses verifikasi. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya berupaya untuk menggambarkan realitas kebijakan pariwisata daerah secara deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam perumusan strategi pembangunan pariwisata yang berbasis hukum, partisipatif, dan berkelanjutan, dengan menjadikan masyarakat adat sebagai mitra utama dalam tata kelola destinasi wisata.

### **1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Pariwisata Mada Oi Tampuro**

Pengembangan pariwisata Mada Oi Tampuro Kecamatan Sanggar merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bima untuk memanfaatkan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah. Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Bima telah merumuskan kebijakan terkait pengembangan pariwisata berbasis potensi alam dan budaya lokal dalam beberapa perencanaan pembangunan daerah. Salah satu dokumen yang menjadi dasar kebijakan ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima, yang menekankan pentingnya pengembangan sektor pariwisata sebagai bagian dari diversifikasi ekonomi daerah.<sup>15</sup>

Secara lebih spesifik, kebijakan yang diambil pemerintah daerah di antaranya mencakup peningkatan infrastruktur dasar, seperti pembangunan jalan, fasilitas umum, serta penyediaan akses yang lebih baik menuju destinasi wisata. Hal ini sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Pariwisata Nasional yang menekankan pentingnya aksesibilitas sebagai faktor dalam menarik wisatawan.

Akan tetapi, implementasi dari kebijakan tersebut terhambat oleh anggaran yang masih bersifat terbatas serta kondisi ketidakmerataan pembangunan antarwilayah yang ada di Kabupaten Bima. Lebih lanjut, pemerintah daerah juga mulai menyusun regulasi yang bertujuan untuk melindungi keberlanjutan alam sekitar serta mengatur pelaksanaan kegiatan wisata di Mada Oi Tampuro.

---

<sup>15</sup> Ni Kadek Putri Widyaningtyas Tirta, Ismet Sulila dan Rusli Isa, *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisata di Desa Olele Kabupaten Bone Bolango*, Publik, Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, Vol.10 (2023).

Kebijakan ini mengarah pada pengembangan wisata berbasis ekologi, yang memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaannya.<sup>16</sup> Akan tetapi, kendala yang sering muncul adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat setempat dalam mengelola pariwisata, serta lemahnya kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait pengelolaan destinasi wisata. Dari sisi pemberdayaan masyarakat, meskipun terdapat beberapa program pelatihan dan pengenalan tentang pariwisata, kenyataannya masyarakat lokal masih terbatas dalam hal kemampuan manajerial dan promosi. Regulasi yang ada belum sepenuhnya memberi ruang bagi masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pengelolaan pariwisata.<sup>17</sup> Akibatnya, pengelolaan destinasi wisata terpusat pada pemerintah daerah atau pihak-pihak eksternal yang kurang memahami kondisi lokal.<sup>18</sup>

## **2. Tantangan dalam Pengembangan Pariwisata Mada Oi Tampuro**

Pengembangan pariwisata Mada Oi Tampuro menghadapi sejumlah tantangan besar, baik dari sisi kebijakan, sosial, maupun infrastruktur. Tantangan pertama yang paling mendasar adalah infrastruktur yang belum memadai. Aksesibilitas menuju lokasi wisata masih menjadi masalah utama. Jalan-jalan menuju Mada Oi Tampuro, meskipun telah mengalami perbaikan, masih terbilang terbatas dan sulit dijangkau, terutama pada musim hujan. Hal ini tentu menjadi hambatan bagi wisatawan yang ingin mengunjungi kawasan tersebut. Padahal, aksesibilitas yang baik merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan pengembangan destinasi wisata. Tantangan kedua adalah kurangnya promosi dan branding destinasi. Walaupun Mada Oi Tampuro memiliki potensi alam yang luar biasa, namun destinasi ini masih kurang dikenal di kalangan wisatawan baik lokal maupun internasional. Salah satu penyebabnya adalah minimnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan promosi dan pemasaran, serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkenalkan destinasi ini lebih luas.

---

<sup>16</sup> Poni Sukaesih Kurniati, Shafira Nur Zakiyani, Fathan Arif Nugroho Yuwono dan Widiya Munigar, *Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata di Wilayah Kota Bandung*, Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.7, No.2 (2023).

<sup>17</sup> Muhammad Hidayat Djabbari, Alwi Alwi dan Saddam Husain Thamrin, *Implementasi Public Private Partnership dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara*, JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), Vol.7, No.1 (2021).

<sup>18</sup> Endah Dwi Lestari, Yoseb Boari, Melyanus Bonsapia dan Silas Marcelino Anes, *Peran Pemerintah terhadap Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Biak Numfor*, Journal Of Economics Review (Joer), Vol.3, No.1 (2023).

Hal ini berdampak pada rendahnya kunjungan wisatawan, berimbas pada rendahnya pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal. Tantangan ketiga adalah keterlibatan masyarakat yang belum optimal. Masyarakat setempat, meskipun mengetahui potensi wisata di daerah mereka, belum sepenuhnya terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata. Kurangnya pelatihan dan pendidikan mengenai manajemen pariwisata menjadi salah satu faktor yang menghambat partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat jangka panjang dari sektor pariwisata mengarah pada sikap kurang peduli terhadap kelestarian alam dan kebersihan lingkungan sekitar.

### **3. Solusi Strategis dalam Pengembangan Pariwisata Mada Oi Tampuro**

Untuk mengatasi tantangan itu, perlu menimbang beberapa solusi strategis dalam rangka pengembangan pariwisata Mada Oi Tampuro yang berkelanjutan. Pertama, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dasar, terutama akses jalan yang menghubungkan lokasi wisata dengan pusat ekonomi dan pemukiman penduduk. Pembangunan jalan yang lebih baik akan membuka peluang bagi wisatawan untuk mudah mengakses destinasi tersebut. Selain itu, peningkatan fasilitas publik seperti tempat parkir, toilet, dan pos pengamanan harus menjadi prioritas dalam pengembangan infrastruktur wisata.

Kedua, promosi yang lebih agresif diperlukan untuk memperkenalkan Mada Oi Tampuro kepada masyarakat luas. Pemerintah daerah perlu menggandeng sektor swasta, seperti agen perjalanan dan pelaku industri pariwisata lainnya, untuk memperkenalkan destinasi ini secara lebih luas. Pemanfaatan teknologi digital, seperti media sosial dan situs web pariwisata, juga dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkenalkan keindahan Mada Oi Tampuro kepada pasar wisatawan global. Penggunaan video promosi yang menampilkan keindahan alam dan budaya lokal bisa menarik minat wisatawan, baik domestik maupun internasional. Ketiga, pemberdayaan masyarakat lokal menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah daerah harus menyusun program pelatihan dan pendidikan yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola pariwisata. Pelatihan ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen destinasi wisata, pelayanan kepada wisatawan, hingga pemasaran dan promosi.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Grace Ginting Kismartini Kismartini, Tri Yuniningsih dan Teuku Afrizal, *Analisis Peran Stakeholders dalam Pengembangan Pariwisata Siosar*, Perspektif, Vol.11, No.1 (2022).

Selain itu, pemerintah daerah dapat mengembangkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan destinasi wisata, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi juga pelaku utama dalam industri pariwisata lokal. Keempat, penguatan regulasi terkait pelestarian lingkungan juga sangat diperlukan. Pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang melindungi kelestarian alam dan sumber daya alam di kawasan Mada Oi Tampuro, termasuk pengaturan yang jelas terkait jumlah wisatawan yang dapat berkunjung dalam satu waktu, pengelolaan sampah, serta pelestarian flora dan fauna di sekitar lokasi wisata. Hal ini penting agar pariwisata yang berkembang tidak merusak ekosistem setempat dan tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Pengembangan pariwisata di Mada Oi Tampuro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, menyiratkan berbagai implikasi ilmiah yang krusial dalam hal sosial, ekonomi, dan lingkungan. Implikasi tersebut harus dipertimbangkan secara holistik agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat lokal, daerah, serta menjaga keberlanjutan alam di masa depan.

Dari perspektif sosial, pengembangan pariwisata harus melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam pengelolaan dan perencanaan destinasi wisata.<sup>20</sup> Jika tidak, terdapat potensi ketimpangan sosial di mana hanya sebagian kelompok masyarakat yang memperoleh manfaat ekonomi dari sektor pariwisata, sementara lainnya tetap bergantung pada sektor pertanian yang rentan terhadap fluktuasi dan perubahan iklim. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama dalam pengembangan pariwisata yang inklusif. Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata, seperti penyediaan homestay, layanan pemandu wisata, atau kuliner lokal, tidak hanya akan memperoleh pendapatan tambahan, tetapi juga merasa lebih memiliki dan bertanggung jawab atas kelestarian destinasi wisata mereka.

---

<sup>20</sup> Arum Sumekar Arna Sasili, *Peran Strategis Dinas Pariwisata sebagai Salah Satu Aktor Pengembangan Pariwisata Pantai (Studi Kabupaten Gunungkidul dari Perspektif Ilmu Pemerintahan)*, *Journal of Politic and Government Studies*, Vol.13, No.1 (2023).

Seiring berjalannya waktu, keberhasilan dalam pemberdayaan ini dapat menciptakan ekosistem sosial yang lebih berkelanjutan, di mana seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaat secara merata. Secara ekonomi, pengembangan sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk mendiversifikasi sumber pendapatan daerah yang selama ini sangat bergantung pada pertanian. Meskipun sektor pertanian merupakan komoditas utama di Mada Oi Tampuro, ketergantungan yang tinggi pada sektor ini mengakibatkan ekonomi lokal menjadi rentan terhadap faktor eksternal seperti fluktuasi harga pasar dan perubahan iklim.

Dengan membuka peluang baru melalui pariwisata, masyarakat setempat dapat memperoleh sumber pendapatan yang lebih beragam. Kegiatan pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, mulai dari pemandu wisata, penyedia akomodasi, hingga pengusaha kuliner dan oleh-oleh. Dampak positif lainnya adalah peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, meskipun potensi ekonomi ini sangat besar, pengelolaan pariwisata harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menciptakan kesenjangan ekonomi, terutama antara mereka yang terlibat langsung dalam sektor pariwisata dan mereka yang tidak.

Namun, implikasi terbesar yang perlu diperhatikan adalah dari segi lingkungan. Mada Oi Tampuro memiliki sumber daya alam yang luar biasa, mulai dari pantai yang masih alami, hutan tropis, hingga pegunungan yang belum banyak dijamah. Sumber daya alam ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, namun di sisi lain juga rentan terhadap kerusakan jika pariwisata tidak dikelola dengan bijaksana. Salah satu dampak potensial dari perkembangan pariwisata yang tidak terkelola dengan baik adalah over-tourism, yang dapat menyebabkan degradasi lingkungan, seperti kerusakan habitat alam, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem lokal.<sup>21</sup> Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan ekowisata, yang berfokus pada pelestarian alam sambil tetap mengakomodasi kebutuhan wisatawan. Kebijakan yang mendukung pariwisata berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan sektor pariwisata dan pelestarian lingkungan.

---

<sup>21</sup> Saadah, Khairul Shaleh, Dini Arwaty, Fitri Sukmawati, R Ferry Mulyawan dan Daniel Nababan, *Analisis Sektor Industri Pariwisata yang Terdampak Covid-19 dan Upaya Pemulihan Ekonomi Indonesia dari Sektor Pariwisata*, Jesya, Vol.6, No.1 (2023).

**Wira Purdiawan Putra, Taufik Firmanto dan Gufran**  
*Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Pariwisata Mada Oi Tampuro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima*

Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta wisatawan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam juga harus menjadi bagian integral dari setiap kebijakan pariwisata. Pengembangan pariwisata di Mada Oi Tampuro memerlukan pendekatan yang holistik dan berbasis pada prinsip keberlanjutan. Kebijakan yang diterapkan tidak hanya harus memperhatikan potensi ekonomi yang dapat dihasilkan, tetapi juga harus mengutamakan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan dan memastikan bahwa dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Dengan demikian, pengembangan pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat bagi keberlanjutan sosial dan lingkungan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata di Mada Oi Tampuro harus dilihat sebagai bagian dari strategi yang lebih besar dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat luas bagi seluruh pemangku kepentingan, baik itu masyarakat lokal, pemerintah daerah, maupun wisatawan itu sendiri.

### **C. PENUTUP**

Pengembangan pariwisata di Mada Oi Tampuro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, menyimpan potensi besar sebagai destinasi wisata unggulan di daerah tersebut. Keindahan alam dan nilai budaya lokal yang dimiliki kawasan ini menjadi daya tarik yang sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Namun, keberhasilan pengembangan pariwisata tersebut sangat tergantung pada kebijakan yang tepat, keberlanjutan pengelolaan, serta partisipasi aktif dari masyarakat lokal. Kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, meskipun sudah mencakup aspek pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas promosi, serta kurangnya sinergi antar pihak terkait dalam pengelolaan pariwisata. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata belum optimal, yang menyebabkan kurangnya rasa kepemilikan terhadap keberlanjutan destinasi tersebut.

Tantangan utama yang dihadapi oleh kawasan wisata Mada Oi Tampuro, di antaranya adalah aksesibilitas yang terbatas, promosi yang belum maksimal, serta kapasitas masyarakat yang belum sepenuhnya siap dalam mengelola dan memanfaatkan potensi wisata. Meskipun demikian, dengan adanya kebijakan yang lebih terarah dan dukungan dari berbagai pihak, potensi tersebut dapat dimaksimalkan menjadi sektor yang menguntungkan bagi ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Publikasi

- Alfianto, Ferbiansyah Yona. *Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Pakuncen*. Paradigma, Vol.10, No.1 (2021).
- Awalliyah, Fitri Nur, Aan Anwar Sihabudin dan Dini Yuliani. *Implementasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Ciamis*, Inskripsi, Vol.2, No.1 (Maret 2022).
- Berliandaldo, Mahardhika dan Ari Prasetyo. *Analisa dan Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan Kendaraan Bermotor Listrik pada Sektor Pariwisata Indonesia*. Sanskara Hukum Dan HAM, Vol.1, No.02 (2022).
- Djabbari, Muhammad Hidayat, Alwi Alwi dan Saddam Husain Thamrin. *Implementasi Public Private Partnership dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara*. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), Vol.7, No.1 (2021).
- Ginting, Grace, Kismartini Kismartini, Tri Yuniningsih dan Teuku Afrizal. *Analisis Peran Stakeholders dalam Pengembangan Pariwisata Siosar*. Perspektif, Vol.11, No.1 (2022).
- Harirah, Zulfa, Wazni Azwar dan Isril Isril. *Melacak Eksistensi Kearifan Lokal dalam Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Siak di Era Globalisasi*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, Vol.10, No.1 (2021).
- Hutagalung, Simon Sumanjoyo dan Dedy Hermawan. *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata di Lampung Selatan*. Sosiohumaniora, Vol.23, No.1 (2021).
- Khotimah, Jasilatul dan Aprilina Pawestri. *Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai*. Jurnal Pamatior: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, Vol.15, No.2 (2022).
- Kurniati, Poni Sukaesih, Shafira Nur Zakiyani, Fathan Arif Nugroho Yuwono dan Widiya Munigar. *Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata di Wilayah Kota Bandung*. Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.7, No.2 (2023).
- Kurniawan, Andri. *Pelaksanaan Strategi Pengembangan Program Wisata Bono oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan*. JIABIS: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Dan Sosial, Vol.1, No.2 (2023).
- Lestari, Endah Dwi, Yoseb Boari, Melyanus Bonsapia dan Silas Marcelino Anes. *Peran Pemerintah terhadap Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Biak Numfor*. Journal Of Economics Review (Joer), Vol.3, No.1 (2023).
- Mariane, Ine, Aswin Palls dan Andre Ariesmansyah. *Model Policy Network dalam Menunjang Implementasi Kebijakan Pariwisata di Kabupaten Kuningan*. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.13, No.2 (2022).
- Masrurun, Zam Zam dan Dyah Meutia Nastiti. *Analisis Stakeholders dalam Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Wonosobo*. Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia, Vol.17, No.1 (2023).

- Pebriana, Fena, Rahman Mulyawan dan Budi Sutrisno. *Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka Tahun 2019)*. Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra), Vol.1, No.1 (2021).
- Roza, Novia Fera, Afifuddin Afifuddin dan Suyeno Suyeno. *Analisis Kebijakan Peran Pariwisata terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kota Batu (Studi Kasus pada Wisata Jatim Park Satu Kota Batu)*. Respon Publik, Vol.16, No.1 (2022).
- Saadah, Saadah, Khairul Shaleh, Dini Arwaty, Fitri Sukmawati, R Ferry Mulyawan dan Daniel Nababan. *Analisis Sektor Industri Pariwisata yang Terdampak Covid-19 dan Upaya Pemulihan Ekonomi Indonesia dari Sektor Pariwisata*. Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah), Vol.6, No.1 (2023).
- Sasili, Arum Sumekar Arna. *Peran Strategis Dinas Pariwisata sebagai Salah Satu Aktor Pengembangan Pariwisata Pantai (Studi Kabupaten Gunungkidul dari Perspektif Ilmu Pemerintahan)*. Journal of Politic and Government Studies, Vol.13, No.1 (2023).
- Soeswoyo, Dina Mayasari. *Potensi Pariwisata dan Strategi Pengembangan Desa Wisata Sukajadi di Kabupaten Bogor*. Masyarakat Pariwisata: Journal of Community Services in Tourism, Vol.2, No.1 (2021).
- Syukri, Syukri, Herman Fithra dan M Akmal. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak*. Jurnal Transparansi Publik (JTP), Vol.2, No.1 (2022).
- Tirta, Ni Kadek Putri Widyaningtyas, Ismet Sulila dan Rusli Isa. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisata di Desa Olele Kabupaten Bone Bolango. Publik*. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, Vol.10 (2023).
- Wardiana, Dudi Ahmad, Ria Arifianti dan Mohammad Benny Alexandri. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kawasan Wisata Situ Cileunca Kabupaten Bandung*. Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik, Vol.4, No.4 (2021).

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.